

---

## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Edison <sup>1)</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi <sup>1)</sup>

Sonedi.1973@gmail.com<sup>1)</sup>

Muhammad Andriansyah <sup>2)</sup>

Institut Agama Islam Batanghari Jambi <sup>2)</sup>

Aan.stai@yahoo.com <sup>2)</sup>

### ABSTRAK

*Pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesetaraan akses dan kesempatan di Indonesia. Diskusi ini menguraikan beberapa aspek kunci dalam menciptakan fondasi pembangunan yang merata. Kebijakan fiskal yang inklusif menonjol sebagai landasan yang memastikan alokasi dana yang adil, keadilan pajak, dan investasi dalam program-program sosial serta infrastruktur yang merata. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi landasan vital dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan pembangunan infrastruktur, menjadi strategi penting dalam mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi esensi dalam merancang kebijakan dan program-program yang mendukung pembangunan inklusif. Melalui pendekatan terpadu dalam kebijakan, pendidikan, pengembangan ekonomi daerah, dan kemitraan antar-sektor, Indonesia dapat menuju arah yang lebih merata dalam pembangunan ekonomi, menciptakan kesetaraan akses, dan membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.*

**Kata kunci :** Pembangunan ekonomi inklusif; kebijakan fiskal; pengembangan ekonomi; pertumbuhan ekonomi

### 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi pusat perhatian dalam upaya menuju kemajuan suatu bangsa (Marlinah, 2019). Indonesia, dengan dinamika ekonominya yang pesat, menorehkan capaian luar biasa dalam beberapa dekade terakhir (Purnamasari, 2021). Peningkatan signifikan dalam sektor-sektor ekonomi, pertumbuhan PDB yang mengesankan, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga, semuanya menandai langkah maju yang membanggakan. Namun, dalam kilau prestasi ini, keberhasilan ekonomi seringkali hanya melukiskan satu sisi dari kenyataan yang lebih kompleks.

Kenyataannya, kemajuan ekonomi yang teramati seringkali tidak mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial, dengan segala bentuknya, terus membangun

---

dinding yang memisahkan antara kelompok yang mendapat manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi dengan mereka yang masih terpinggirkan. Kesenjangan pendapatan yang melebar, akses terhadap layanan kesehatan yang tidak merata, dan peluang ekonomi yang tak seimbang menjadi titik fokus dalam perbincangan tentang dampak sosial dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Tulisan ini memandang pentingnya mengkaji dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan ini, khususnya terkait dengan aspek-aspek sosialnya, menjadi sorotan utama. Kita tidak hanya ingin mengidentifikasi ketimpangan yang muncul, tetapi juga memahami akar penyebabnya. Dari kebijakan fiskal hingga pola distribusi manfaat ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang memengaruhi aksesibilitas, semua akan menjadi fokus perhatian.

Penelusuran atas kebijakan ekonomi Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bisa menjadi faktor ketimpangan yang makin dalam. Dari pemahaman yang lebih komprehensif ini, diharapkan kita bisa menemukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi hak segelintir, tetapi sebuah kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **2. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai informasi dari referensi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan pemerintah, jurnal akademis, studi kasus, dan statistik resmi terkait pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inklusivitas ekonomi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN**

Pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sorotan utama dalam arus informasi global, mencerminkan dinamika yang kompleks dari kegiatan ekonomi yang berkembang di berbagai negara (Sharma & Soederberg, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan

---

tren pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di berbagai bagian. Meskipun adanya pertumbuhan yang signifikan di beberapa negara maju, terdapat juga tantangan yang masih dihadapi, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia telah menunjukkan pola yang tidak konsisten. Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi global telah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Meskipun pada tahun-tahun tertentu terjadi kenaikan yang signifikan, ada juga periode di mana pertumbuhan tersebut melambat atau bahkan mengalami kontraksi. Ini tercermin dalam perubahan dinamika pasar, fluktuasi harga komoditas, serta pergeseran kekuatan ekonomi di berbagai belahan dunia (Alquist et al., 2020; Baker et al., 2020).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, telah menjadi fokus perhatian. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam ekonominya (Nugroho, 2021). Pertumbuhan PDB yang stabil, meningkatnya investasi, dan kestabilan makroekonomi telah menjadi landasan bagi pencapaian yang signifikan. Namun, di balik prestasi tersebut, tantangan besar masih memerlukan perhatian serius. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia juga mempengaruhi Indonesia. Misalnya, ketegangan perdagangan global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan ekonomi di negara-negara maju dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia (Maryanti et al., 2023). Selain itu, aspek domestik seperti kualitas infrastruktur, tingkat investasi, stabilitas politik, serta perubahan kebijakan dalam negeri juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia beradaptasi terhadap dinamika global. Meskipun berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonominya, Indonesia juga harus menghadapi tantangan dalam mengimbangi faktor-faktor eksternal yang tidak selalu terkendali. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas kebijakan ekonomi, kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian global, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi eksternal. Kendati demikian, Indonesia terus berusaha untuk memperkuat fondasi pertumbuhannya. Dari upaya diversifikasi ekonomi hingga peningkatan infrastruktur, langkah-langkah strategis telah diambil untuk memperkuat ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Selain itu, fokus pada inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peluang sektor ekonomi baru menjadi bagian integral dari strategi untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam melihat tantangan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia khususnya, penting untuk mengakui bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung

---

mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan sosial, masalah ketenagakerjaan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga perlu menjadi fokus dalam pembahasan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia merupakan bagian dari narasi yang lebih luas tentang dinamika ekonomi global dan upaya negara-negara untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya memahami tantangan ini, baik di tingkat global maupun domestik, akan menjadi kunci dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3.2 KETIMPANGAN EKONOMI: TANTANGAN TERSEMBUNYI DI BALIK PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi seringkali disajikan sebagai tonggak keberhasilan suatu negara. Namun, dalam cahaya sorotan pertumbuhan yang gemilang, muncul ketidakseimbangan yang makin melebar di berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Di panggung global, ketimpangan ekonomi telah menjadi fokus utama diskusi tentang kesejahteraan sosial. Berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak luput dari tantangan ini. Ketimpangan dalam pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan ekonomi masih menjadi cerminan yang mengkhawatirkan, meskipun pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka yang mengesankan.

Di Indonesia, ketimpangan ekonomi tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin terus membesar, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu poin penting dalam diskusi tentang ketimpangan ekonomi adalah dampaknya terhadap akses terhadap layanan dasar. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih ada sebagian masyarakat yang belum merasakan manfaatnya secara langsung. Akses terhadap layanan kesehatan yang merata, pendidikan yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai masih menjadi mimpi bagi sebagian lapisan masyarakat.

Ketimpangan ekonomi juga memperlihatkan ketidakpastian dalam akses terhadap peluang ekonomi. Di Indonesia, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu

contoh yang jelas. Akses terhadap lapangan kerja yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta fasilitas ekonomi yang memadai seringkali tidak merata antara wilayah perkotaan yang maju dan pedesaan yang masih tertinggal. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan ini, tantangan tetap besar. Perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, investasi dalam sumber daya manusia, serta dukungan terhadap sektor-sektor yang tertinggal menjadi bagian integral dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.

Di tingkat global, kesadaran tentang perlunya aksi bersama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi juga semakin meningkat. Peningkatan kerja sama antarnegara, kebijakan perdagangan yang lebih adil, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dan sumber daya menjadi fokus utama dalam agenda global (Aiginger & Rodrik, 2020; Kwilinski et al., 2023). Dalam memahami ketimpangan ekonomi, penting untuk melihatnya sebagai lebih dari sekadar angka statistik. Ini merupakan refleksi dari ketidakseimbangan yang mempengaruhi kualitas hidup individu-individu di berbagai tingkatan. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan ini menjadi krusial dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi semua.

### **3.3 AFIRMASI PEMBANGUNAN: ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL**

Afirmasi pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan ketimpangan sosial menjadi pondasi utama dalam penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sering dianggap sebagai tonggak keberhasilan suatu negara, namun, arti sebenarnya dari pembangunan yang berkelanjutan adalah menciptakan kesempatan yang merata bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Afirmasi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kokoh harus diiringi dengan upaya konkret dalam mengurangi ketimpangan sosial. Ini tidak hanya berarti menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan agar manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akses yang merata terhadap pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai menjadi pijakan dalam pemahaman konkrit dari afirmasi ini. Pentingnya mengurangi ketimpangan sosial juga terlihat dalam upaya memajukan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa menyeimbangkan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya

---

dan peluang, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mencapai tujuan yang lebih luas dalam pembangunan. Afirmasi ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, afirmasi ini menyoroti peran penting kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan ini. Kebijakan yang mendukung inklusivitas, perlindungan sosial, pendekatan yang berbasis pada kesetaraan, serta investasi dalam sumber daya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mengurangi ketimpangan sosial. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga tentang kesadaran akan keadilan sosial dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Afirmasi pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan ketimpangan sosial mengilhami upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui kerjasama antar sektor, inklusi dalam proses pengambilan keputusan, dan upaya konkret dalam memperbaiki kesejahteraan yang merata, afirmasi ini menjadi komitmen untuk membangun masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua orang.

Afirmasi ini bukan sekadar aspirasi, tetapi juga menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan yang melekat dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas, misalnya, menjadi landasan yang vital dalam mengurangi ketimpangan. Investasi dalam sistem pendidikan yang inklusif memberikan akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan mereka dalam pasar kerja yang kompetitif. Tidak hanya pendidikan, tetapi juga kesetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan menjadi aspek penting dalam afirmasi ini. Ketika setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, ini bukan hanya tentang menanggulangi penyakit, tetapi juga tentang mengurangi ketidaksetaraan dalam kesempatan hidup yang sehat.

Seiring dengan itu, perlindungan sosial menjadi inti dari upaya mengurangi ketimpangan sosial. Program-program yang dirancang untuk membantu kelompok-kelompok yang rentan, seperti tunawisma, anak-anak yang terpinggirkan, dan lansia, menjadi bagian penting dari pembangunan yang inklusif. Ini menciptakan jaring pengaman sosial yang dapat mengurangi tekanan ekonomi dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap peluang. Pada tingkat makro, kebijakan fiskal yang berpihak pada inklusi menjadi kunci dalam afirmasi ini. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diadopsi mampu mendukung inklusivitas. Hal ini mencakup perluasan akses terhadap kredit bagi usaha

---

kecil dan menengah, perbaikan kebijakan pajak yang adil, serta penggunaan anggaran publik yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan.

Dalam sebuah paradigma pembangunan yang memasukkan aspirasi inklusivitas, ketimpangan sosial bukanlah hambatan yang tidak teratasi, tetapi juga merupakan peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara ekonomi, negara menjadi lebih kuat dan masyarakat lebih stabil. Oleh karena itu, afirmasi pembangunan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi landasan yang tidak hanya memandu kebijakan, tetapi juga menjadi pandangan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua. Dengan kesadaran akan peran masing-masing individu dan institusi dalam mencapai tujuan ini, kita dapat menggerakkan arus pembangunan yang lebih baik bagi semua pihak

### **3.4 Solusi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia**

#### **3.4.1 Kebijakan Fiskal yang Inklusif: Fondasi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata**

Kebijakan fiskal yang inklusif menjadi inti dari strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, fiskalitas tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana publik dan mengurangi disparitas ekonomi. Pendekatan pajak yang adil dan progresif menjadi elemen kunci dalam kebijakan fiskal yang inklusif. Memastikan bahwa kontribusi pajak sejalan dengan kemampuan ekonomi individu adalah esensi dari pendekatan progresif. Ini berarti bahwa golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar akan membayar proporsi pajak yang lebih besar pula. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang cermat. Sistem pajak haruslah seimbang, menghindari ketidakadilan atau beban yang berlebihan terhadap sektor-sektor tertentu. Pengaturan ulang atau peningkatan pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi menjadi pilihan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani kelompok ekonomi rentan.

Penerimaan pajak yang diperoleh dari kebijakan yang lebih inklusif harus dialokasikan secara tepat dan efisien. Pemakaian pendapatan pajak untuk program sosial dan infrastruktur merata akan membentuk landasan utama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Sebagian besar pendapatan pajak harus digunakan untuk membangun sistem kesehatan

---

dan pendidikan yang lebih baik. Program-program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segala lapisan sosial. Ini tidak hanya termasuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, akses kesehatan, dan fasilitas publik yang merata.

Kebijakan fiskal yang inklusif juga memerlukan evaluasi berkala. Kondisi ekonomi dan sosial yang selalu berubah menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan yang diterapkan. Evaluasi berkala akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif. Pemerintah juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada pemecahan masalah struktural dan ketimpangan ekonomi lebih merupakan investasi masa depan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan fiskal yang inklusif tidaklah mudah. Tantangan besar termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang berpotensi terpengaruh secara langsung oleh kebijakan tersebut. Ketika kebijakan yang mengatur ulang pajak diluncurkan, akan ada reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin merasa terbebani. Selain itu, kurangnya kepatuhan pajak dan masalah administratif dalam pengumpulan dan alokasi dana juga menjadi hambatan. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak serta perbaikan dalam administrasi pajak akan menjadi bagian krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan fiskal yang inklusif. Implementasi kebijakan fiskal yang inklusif akan memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Adanya akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk terlibat dalam ekonomi. Dengan adanya infrastruktur dan layanan yang lebih merata, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga dapat dikurangi. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi yang inklusif.

#### **3.4.2 PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA: KUNCI KESETARAAN AKSES DAN KESEMPATAN**

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mengurangi ketimpangan sosial. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan fondasi penting dalam memastikan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

---

Perluasan akses pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga tingkat pendidikan tinggi menjadi prioritas. Upaya untuk memberikan akses yang merata bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah terpencil merupakan langkah awal yang esensial dalam menciptakan fondasi yang merata bagi setiap individu.

Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan juga penting. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, peningkatan standar pengajaran, dan akses terhadap sarana pendidikan yang memadai menjadi bagian integral dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan akses terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah terpencil menjadi esensial. Pembangunan infrastruktur pendidikan, rekrutmen guru berkualitas, dan peningkatan ketersediaan materi pembelajaran menjadi langkah yang perlu diperhatikan secara khusus.

Membantu keluarga miskin agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas merupakan bagian kunci dari solusi ini. Program bantuan pendidikan seperti beasiswa, bantuan biaya sekolah, atau subsidi buku dan seragam sekolah bisa menjadi solusi efektif. Hal ini akan mendorong partisipasi pendidikan dari kelompok yang sebelumnya sulit untuk mengaksesnya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mereduksi ketimpangan sosial. Dengan memberikan akses yang merata terhadap pendidikan, akan tercipta kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Ini tidak hanya menciptakan mobilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai pendidikan yang merata di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Kurangnya sumber daya, kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan lokal, dan kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan menjadi masalah utama. Tantangan lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di daerah terpencil, serta kesulitan dalam merekrut guru yang berkualitas untuk mengajar di wilayah-wilayah terpencil tersebut. Pendidikan yang merata memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Akses yang merata terhadap pendidikan akan meningkatkan tingkat literasi dan kualifikasi tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan yang merata juga dapat mengurangi ketimpangan sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan

---

pendidikan berkualitas, akan tercipta masyarakat yang lebih berpengetahuan, inklusif, dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

### **3.4.3 PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN ANTARA PERKOTAAN DAN PEDESAAN**

Pengembangan ekonomi daerah menjadi kunci dalam upaya mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terpencil menjadi strategi penting dalam menciptakan kesetaraan ekonomi di berbagai wilayah. Mendorong pertumbuhan UMKM di daerah terpencil memiliki dampak yang signifikan dalam pengurangan ketimpangan ekonomi. Bantuan modal, pelatihan keterampilan, akses pasar yang lebih baik, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha menjadi bagian penting dari solusi ini.

Peningkatan kapasitas UMKM, termasuk dukungan dalam hal teknologi, manajemen, dan akses keuangan, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi lokal. Inisiatif ini juga dapat menciptakan lapangan kerja lokal yang dapat mengurangi tingkat migrasi ke perkotaan. Kekurangan infrastruktur merupakan hambatan besar dalam pengembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan akses telekomunikasi yang memadai. Peningkatan infrastruktur ini akan membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Program kemitraan yang berorientasi pada inklusi sosial akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah terpencil.

Keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberikan pelatihan, serta memfasilitasi akses pasar bagi UMKM adalah langkah yang sangat diperlukan. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing UMKM lokal tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Namun, terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan. UMKM di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal dan layanan keuangan yang memadai.

Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi modern juga menjadi hambatan. Peningkatan kapasitas manusia di daerah terpencil dalam hal ini menjadi

---

kunci untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara global. Pengembangan ekonomi daerah memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga dapat menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat migrasi ke kota-kota besar. Melalui pendekatan yang terencana dan terkoordinasi, pengembangan ekonomi daerah akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

#### **3.4.4 KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT SIPIL: FONDASI KEMITRAAN YANG INKLUSIF**

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi pondasi yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kemitraan yang kuat antara ketiga sektor ini menjadi kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan yang merata. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan kondisi yang mendukung kolaborasi ini. Melalui kebijakan yang inklusif dan peraturan yang jelas, pemerintah dapat membentuk lingkungan yang kondusif bagi kemitraan antar sektor. Ini termasuk regulasi yang mempromosikan investasi yang berkelanjutan, insentif bagi sektor swasta yang berpartisipasi dalam program-program inklusi sosial, serta memberikan dukungan bagi inisiatif masyarakat sipil yang mendukung pembangunan.

Sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui investasi yang berkelanjutan dan keberlanjutan, sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya dari segi pendanaan, tetapi juga melalui transfer teknologi, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan keterampilan. Peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam kolaborasi ini. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan pemantau kebijakan publik, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan swasta memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga dapat menjadi agen perubahan melalui inisiatif dan program-program yang mereka rancang untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

Meskipun kolaborasi antar sektor memiliki potensi besar, terdapat tantangan dalam implementasinya. Perbedaan tujuan, kepentingan, dan pendekatan yang berbeda antar sektor seringkali menjadi hambatan. Misalnya, kepentingan finansial sektor swasta mungkin tidak

---

selalu sejalan dengan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat sipil. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menghambat kolaborasi ini.

Namun, manfaat dari kolaborasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangatlah besar. Dengan bekerja sama, ketiga sektor ini dapat mengatasi berbagai masalah yang sulit diatasi secara individu. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kemitraan yang inklusif juga memungkinkan adanya inovasi yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang mampu menjangkau lebih banyak orang secara efektif. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kemitraan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat luas.

### **3.5 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF**

Implementasi kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif memerlukan serangkaian langkah konkret yang dapat dijalankan di Indonesia. Langkah kunci termasuk alokasi dana yang adil dalam kebijakan fiskal untuk mendukung sektor ekonomi yang beragam. Hal ini melibatkan pengalokasian anggaran secara adil, memberikan prioritas pada sektor yang membutuhkan dukungan lebih besar guna mengurangi kesenjangan sosial. Reformasi pajak yang komprehensif juga penting untuk mendukung inklusi ekonomi dengan mengurangi ketimpangan dalam kontribusi pajak serta memberikan insentif bagi pertumbuhan bisnis di sektor-sektor terpinggirkan. Investasi strategis dalam infrastruktur dan program sosial yang merata menjadi aspek lain yang krusial dalam memastikan akses setara terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, yang dapat mengurangi kesenjangan regional dan sosial. Fokus pada pengembangan pendidikan yang merata di seluruh negeri juga sangat penting dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi individu dari latar belakang yang beragam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembangunan infrastruktur di pedesaan, akan membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam perumusan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif. Pendekatan terpadu dari berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mengarah pada pembangunan

---

ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Implementasi kebijakan yang tepat dan didukung oleh kolaborasi lintas-sektor akan menjadi kunci utama dalam menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

#### 4. KESIMPULAN

Diskusi mengenai pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia menyoroti sejumlah poin kunci yang krusial. Fondasi utama terletak pada kebijakan fiskal inklusif yang menegaskan pentingnya keadilan pajak, alokasi dana untuk program sosial, dan infrastruktur yang tersebar merata. Tak kalah pentingnya adalah investasi dalam pendidikan berkualitas yang merata, yang menjadi landasan untuk memastikan akses setara terhadap peluang ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan infrastruktur di daerah terpencil, menjadi strategi vital untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya kemitraan erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas-sektor menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif, menggabungkan beragam sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk menciptakan solusi holistik. Melalui langkah-langkah terpadu dalam kebijakan, pendidikan, pengembangan ekonomi daerah, dan kerja sama antar-sektor, Indonesia berpotensi maju ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terciptanya kesetaraan akses, serta perjuangan menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

#### 5. REFERENSI

- Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. In *Journal of Industry, Competition and Trade* (Vol. 20, Issue 2, pp. 189–207). Springer. <https://doi.org/10.1007/s10842-019-00322-3>
- Alquist, R., Bhattarai, S., & Coibion, O. (2020). Commodity-price comovement and global economic activity. *Journal of Monetary Economics*, 112, 41–56. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.02.004>
- Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–27. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),

- 
- Baker, P., Machado, P., Santos, T., Sievert, K., Backholer, K., Hadjidakou, M., Russell, C., Huse, O., Bell, C., Scrinis, G., Worsley, A., Friel, S., & Lawrence, M. (2020). Ultra-processed foods and the nutrition transition: Global, regional and national trends, food systems transformations and political economy drivers. In *Obesity Reviews* (Vol. 21, Issue 12). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/obr.13126>
- Kwilinski, A., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Unlocking Sustainable Value through Digital Transformation: An Examination of ESG Performance. *Information (Switzerland)*, *14*(8). <https://doi.org/10.3390/info14080444>
- Marlinah. (2019). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Digitalpreneur dan Creativepreneur. *IKRAITH-EKONOMIKA*, *2*(1), 32–38.
- Maryanti, S., Widayat, P., & Lubis, N. (2023). PROSPEK EKONOMI INDONESIA: PERSPEKTIF MAKROEKONOMI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *20*(2), 146–155.
- Nugroho, H. (2021). Indonesia Development Update A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning*, *5*(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1>
- Sharma, S., & Soederberg, S. (2020). Redesigning the business of development: the case of the World Economic Forum and global risk management. *Review of International Political Economy*, *27*(4), 828–854. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1640125>